

BAB III

REPRESENTASI WACANA DALAM TAKARIR INSTAGRAM

@TERELIYEWITER BERDASARKAN ANALISIS WACANA KRITIS

PERSPEKTIF NORMAN FAIRCLOUGH

Berdasarkan Analisis Wacana Kritis perspektif Norman Fairclough, teks dipahami tidak lagi melalui rangkaian kata, melainkan praktik sosial yang memuat ideologi, relasi kuasa, dan pandangan tertentu terhadap realitas sosial. Analisis terhadap data tersebut dapat dilakukan lewat pemilihan kata, tindakan bahasa, serta konteks sosial dan ideologi yang melatarbelakangi.

A. Dimensi Teks

Berdasarkan hasil analisis bentuk bahasa sindiran menggunakan teori Keraf, ditemukan bahwa majas yang paling dominan dalam takarir Instagram @tereliyewriter adalah sinisme. Majas tersebut menunjukkan kecenderungan penulis dalam menyampaikan kritik secara lugas, tegas, dan langsung terhadap berbagai persoalan publik. Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, temuan tersebut tidak lagi dipahami sebagai bentuk kebahasaan semata, melainkan sebagai representasi sosial yang dibangun melalui teks. Pada dimensi teks, penulis direpresentasikan sebagai sosok yang vokal dalam mengkritik berbagai kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil analisis, representasi yang muncul dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori utama, yaitu representasi kritik terhadap kebijakan pemerintah, representasi kritik terhadap kompetensi pejabat, representasi kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan, representasi kritik terhadap korupsi dan pemborosan anggaran negara, representasi kritik terhadap nepotisme dan hak istimewa politik, serta representasi kritik terhadap kondisi sosial masyarakat.

1. Representasi Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah

Data A.5

“Selamat deh buat kades2 seluruh Indonesia, selamat mikirin cicilan utang 😊
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 2 Mei 2026)

Data B.7

“Ngapain elu menalangi biaya kenaikan haji begini? Hanya demi pencitraan, bukan?”
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 15 April 2026)

Data B.8

**“Kenapa guru di Indonesia gajinya rendah? Malah pegawai2 dapur lebih tinggi sekarang?
Jawabannya simpel sekali: karena TIDAK pernah dianggap penting. Jadi buat apa dipikirin? Nggak penting ini.”**
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 20 April 2026)

Data B.10

**“Nggak ngotak
Dan BGN ini kebal sekali. Mau jungkir balik orang2 mengkritisi, mereka tetap hajar blas, beliii!”**
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 21 April 2026)

Data C.1

**“Pemimpin Tolol
Tapi kalian jual pasir ke negara lain? Itu tuh begoooo! Alangkah rakusnya kalian.”**
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 13 September 2024)

Data C.2

“berkali2 sy nagih janji diatasi, zonk! Wapres kalian itu Cuma jago pencitraan. Inilah negara kentut. Penegakan hukumnya busuk sekali.”
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 20 Juli 2025)

Data C.3

“Saat Agus sukses, dasar setan! Pemerintah maksa minta pajak.”
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 22 Maret 2026)

Data E.2

“Pak Indo itu paling rajin ikutan acara RT/RW.”
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 6 Mei 2026)

Takarir pada data A.5 merepresentasikan kebijakan pemerintah sebagai sumber beban baru bagi kepala desa. Representasi tersebut dibangun melalui penggunaan ungkapan “selamat deh” yang secara tekstual tampak sebagai ucapan selamat, tetapi dalam konteks wacana justru menunjukkan situasi yang tidak

menyenangkan. Sementara itu, frasa “mikirin cicilan utang” menempatkan kepala desa sebagai pihak yang harus menghadapi konsekuensi kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui konstruksi tersebut, teks membangun gambaran bahwa kebijakan pemerintah tidak dipersepsikan sebagai solusi, melainkan sebagai sumber persoalan baru yang menambah beban administrasi maupun finansial di tingkat desa.

Takrir pada data B.7 merepresentasikan kebijakan pemerintah sebagai tindakan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kepentingan publik. Representasi tersebut dibangun melalui pertanyaan retorik yang mempertanyakan pentingnya penyaluran dana untuk menalangi biaya haji. Selain itu, penggunaan frasa “hanya demi pencitraan” membangun citra bahwa kebijakan tersebut lebih berfungsi untuk memperoleh simpati masyarakat daripada menyelesaikan persoalan secara mendasar. Dengan demikian, teks merepresentasikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap lebih berorientasi pada kepentingan politik dan pencitraan daripada efektivitas penggunaan anggaran publik

Takrir pada data B.8 merepresentasikan guru sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam prioritas pembangunan. Representasi tersebut dibangun melalui perbandingan antara gaji guru dan gaji pegawai dapur yang menunjukkan adanya ketimpangan penghargaan terhadap profesi tertentu. Frasa “TIDAK pernah dianggap penting” membangun citra bahwa kesejahteraan guru tidak memperoleh perhatian yang memadai dari pemerintah. Sementara itu, pengulangan ungkapan “nggak penting” memperkuat representasi bahwa profesi guru ditempatkan pada posisi yang kurang dihargai dalam kebijakan publik. Dengan demikian, teks ini merepresentasikan kritik terhadap kebijakan

pemerintah yang dinilai belum memberikan perhatian yang proporsional terhadap kesejahteraan guru.

Takarir pada data B.10 merepresentasikan pemerintah atau lembaga negara sebagai pihak yang tidak responsif terhadap kritik masyarakat. Representasi tersebut dibangun melalui penggunaan frasa “kebal sekali” yang menggambarkan ketidakpedulian terhadap berbagai masukan dan kritik. Selain itu, ungkapan “tetap hajar blas, beliii!” merepresentasikan adanya tindakan yang terus dijalankan tanpa mempertimbangkan keberatan yang muncul dari publik. Dengan demikian, teks ini membangun citra bahwa kebijakan pemerintah dijalankan secara sepihak dan kurang memperhatikan aspirasi masyarakat.

Takarir pada data C.1 merepresentasikan kebijakan ekspor pasir sebagai tindakan yang merugikan negara dan mengabaikan kepentingan jangka panjang masyarakat Indonesia. Representasi tersebut dibangun melalui penggunaan diksi “begoooo” dan “rakus” yang memberikan penilaian negatif terhadap pihak yang mendukung atau mengizinkan kebijakan tersebut. Selain itu, penggambaran bahwa pasir Indonesia dapat digunakan untuk memperluas wilayah negara lain membangun citra bahwa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan konsekuensi strategis di masa depan. Dengan demikian, teks merepresentasikan kebijakan pemerintah sebagai kebijakan yang tidak bijaksana dan lebih mengutamakan keuntungan sesaat daripada kepentingan nasional.

Takarir pada data C.2 merepresentasikan pemerintah sebagai pihak yang tidak mampu memenuhi janji dan tidak efektif dalam menjalankan penegakan hukum. Representasi tersebut dibangun melalui kata “zonk” yang menggambarkan kekecewaan terhadap janji yang tidak terealisasi, serta frasa

“jago pencitraan” yang membentuk citra pemimpin sebagai sosok yang lebih mengutamakan penampilan daripada penyelesaian masalah. Sementara itu, ungkapan “penegakan hukumnya busuk sekali” merepresentasikan sistem hukum sebagai sesuatu yang bermasalah dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dengan demikian, teks membangun kritik terhadap kinerja pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan menindak pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Takrir pada data C.3 merepresentasikan pemerintah sebagai institusi yang tidak adil dalam hubungan dengan warga negara. Representasi tersebut dibangun melalui kontras antara perjuangan individu yang digambarkan mengalami berbagai kesulitan hingga mencapai kesuksesan dengan tindakan pemerintah yang muncul ketika hasil keberhasilan tersebut sudah diperoleh. Frasa “pemerintah maksa minta pajak” membangun citra negara sebagai pihak yang lebih berorientasi pada pemungutan kewajiban warga daripada memberikan perlindungan atau bantuan ketika warga menghadapi kesulitan. Dengan demikian, teks merepresentasikan kritik terhadap kebijakan perpajakan dan peran negara yang dianggap belum memberikan timbal balik yang seimbang kepada masyarakat.

Takrir pada data E.2 merepresentasikan pejabat sebagai pihak yang lebih banyak terlibat dalam aktivitas pertemuan dan hubungan eksternal daripada berfokus pada penyelesaian persoalan domestik. Representasi tersebut dibangun melalui penyamaan kegiatan kenegaraan dengan “acara RT/RW”, yaitu kegiatan yang dalam kehidupan sehari-hari identik dengan pertemuan rutin warga. Pilihan diksi tersebut mengecilkan aktivitas yang sebenarnya berskala internasional

sehingga menghasilkan kesan bahwa kegiatan tersebut terlalu sering dilakukan dan kurang memberikan dampak nyata. Dengan demikian, teks merepresentasikan kritik terhadap prioritas kebijakan pemerintah yang dianggap lebih menonjolkan aktivitas seremonial, daripada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.

2. Representasi Kritik Terhadap Kompetensi Pejabat

Data A.1

“Dia merasa... sudah keren banget, "segera matikan kompor kalau sdh matang masaknya." Duh, dia merasa.... dia sudah keren banget. Dia tdk tahu, 99% emak2 di Indonesia itu memang segera matikan kompor kalau sdh matang.”

(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 27 Maret 2026)

Data A.3

“Tenang. Itu tuh demi investasi, nanti pulang2 bawa investasi ribuan triliun. Juga demi minyak. Pun demi perdamaian dunia. Posisi Indonesia itu penting sekali di dunia.

Hati2 di jalan, Pak. Nanti baru beberapa hari pulang di Indonesia, ceramah sana, ngomel sini,”

(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 11 April 2026)

Data B.2

“Maka, jangan dipertontonkan kebodohan begini. Pinter dikitlah.”

(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 2 Maret 2024)

Data B.12

“Kelakukan primitif dan memalukan ini ternyata ada penerusnya.”

(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 1 Mei 2026)

Data B.14

“Dan mulailah ngaca, Dadan, menu MBG seupil gitu kamu klaim bergizi? Protein tinggi? Kalori sampai 700? Halu.”

(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 5 Mei 2026)

Data C.6

“Horeee, ditutup sebulan, tetap dapat intensif. Benar2 TOLOL si Dadan ini. Bilangi ke dia.”

(Sumber: Instagram (@tereliyewriter, 29 April 2026)

Takrir pada data A.1 merepresentasikan pejabat sebagai sosok yang kurang memahami kondisi nyata masyarakat. Representasi tersebut dibangun melalui penggambaran bahwa pejabat merasa telah menyampaikan solusi penting, padahal perilaku yang disarankan sudah menjadi kebiasaan umum masyarakat. Pengulangan frasa “dia merasa” memperkuat citra bahwa pejabat memiliki

keyakinan berlebihan terhadap gagasannya sendiri. Sementara itu, penyebutan “99% emak-emak di Indonesia” digunakan untuk menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya telah melakukan hal tersebut tanpa perlu diarahkan. Dengan demikian, teks merepresentasikan keraguan terhadap kompetensi pejabat dalam memahami persoalan publik dan merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Takrir pada data A.3 merepresentasikan keraguan terhadap kompetensi pejabat dalam menghasilkan manfaat nyata dari aktivitas diplomasi dan kunjungan luar negeri. Representasi tersebut dibangun melalui penyebutan berbagai alasan yang terkesan berlebihan, seperti investasi, minyak, dan perdamaian dunia. Pengulangan alasan-alasan tersebut membentuk kesan bahwa klaim keberhasilan pejabat tidak sepenuhnya dipercaya. Selain itu, kalimat “ceramah sana, ngomel sini” membangun citra pejabat sebagai pihak yang lebih banyak berbicara daripada menunjukkan hasil konkret. Dengan demikian, teks ini merepresentasikan kritik terhadap kapasitas dan kinerja pejabat dalam menjalankan tugas publik.

Takrir pada data B.2 merepresentasikan pejabat sebagai pihak yang kurang kompeten dalam memahami maupun memperlihatkan penggunaan teknologi kepada publik. Representasi tersebut dibangun melalui penggunaan kata “kebodohan” yang memberikan penilaian negatif terhadap tindakan yang dilakukan pejabat. Selain itu, frasa “Pinter dikitlah” menunjukkan adanya tuntutan agar pejabat memiliki kemampuan berpikir dan bertindak yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Melalui pilihan diksi tersebut, teks membangun citra bahwa perilaku pejabat tidak mencerminkan profesionalitas dan kapasitas yang

diharapkan oleh masyarakat. Dengan demikian, wacana ini merepresentasikan kritik terhadap kompetensi pejabat dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab publik.

Takarir pada data B.12 merepresentasikan pemimpin sebagai figur yang tidak menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan persoalan negara. Representasi tersebut dibangun melalui penggunaan diksi “primitif” dan “memalukan” yang memberikan penilaian negatif terhadap tindakan yang dilakukan. Selain itu, frasa “ada penerusnya” menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak dipandang sebagai tindakan individual semata, melainkan sebagai pola yang terus berlanjut dalam kepemimpinan. Dengan demikian, teks membangun citra bahwa pemimpin lebih menonjolkan tindakan yang bersifat seremonial dibandingkan fokus pada penyelesaian masalah yang dianggap lebih penting bagi masyarakat.

Takarir pada data B.14 merepresentasikan pejabat sebagai sosok yang tidak memiliki penilaian yang memadai dalam menjelaskan kualitas program yang dijelaskannya. Representasi tersebut dibangun melalui pertentangan antara ukuran porsi makanan yang digambarkan dengan kata “seupil” dan klaim mengenai kandungan gizi, protein, serta kalori yang tinggi. Penggunaan kata “ngaca” dan “halu” semakin memperkuat citra bahwa pejabat dianggap tidak realistis dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dengan demikian, teks merepresentasikan keraguan terhadap kompetensi dan kredibilitas pejabat dalam mengelola maupun menjelaskan program publik.

Takarir pada data C.6 merepresentasikan pejabat sebagai sosok yang tidak cermat dalam mengelola program publik. Representasi tersebut dibangun melalui

kontras antara kondisi dapur MBG yang “ditutup sebulan” dengan fakta bahwa dapur tersebut “tetap dapat insentif”. Pertentangan tersebut membangun kesan adanya keputusan yang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, penggunaan kata “TOLOL” memperkuat representasi bahwa pejabat yang bertanggung jawab dianggap tidak memiliki pertimbangan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, teks ini merepresentasikan keraguan terhadap kompetensi pejabat dalam mengelola program dan penggunaan anggaran publik.

3. Representasi Kritik Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan

Data A.4

“Selamat buat Kepala Daerah dan Kepala Desa, yang sabar yo, satu komando gitu loh sama Prabowo.”

(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 2 Mei 2026)

Data C.4

“Sejak kapan TUHAN ngasih kalian hak malakin rakyat, bangsat?”

(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 22 Maret 2026)

Data C.5

“Negara ini bukan punya keluarga kalian saja, bangsat! Itu tuh tikungan tajam. Tanjakan berbahaya. Jalan milik publik. Yang seharusnya semua orang menghormati pengguna jalan lain, berhati2.”

(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 13 April 2026)

Data D.1

“Dear produser film2 horor,

Sy mau ngasih saran. Daripada kalian bikin film horror bawa2 agama, coba sesekali bikin film horor dgn judul sbb:

-Siksa Kubur Koruptor

-Mulut Belatung Politisi Penjilat

-Setan Pun Training Dengan Jenderal Polisi

-Tangan Bernanah Para Buzzer

-Babi Ngepet vs Relawan Ngepet

-Perut Buncit Berisi Ular Para Pejabat”

(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 28 Maret 2024)

Takrir pada data A.4 merepresentasikan adanya hubungan kekuasaan yang tidak setara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Representasi tersebut dibangun melalui frasa “satu komando” yang identik dengan sistem

hierarkis, di mana keputusan dan arah kebijakan ditentukan oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Sementara itu, ungkapan “yang sabar yo” menunjukkan bahwa kepala daerah dan kepala desa diposisikan sebagai pihak yang harus menerima dan mengikuti kebijakan tersebut. Dengan demikian, teks ini merepresentasikan kritik terhadap praktik kekuasaan yang terpusat dan berpotensi membatasi kemandirian aktor-aktor pemerintahan di tingkat daerah.

Takarir pada data C.4 merepresentasikan hubungan yang timpang antara penguasa dan rakyat. Representasi tersebut dibangun melalui pertanyaan retorik “Sejak kapan TUHAN ngasih kalian hak malakin rakyat, bangsat?” yang mempertanyakan dasar moral tindakan penguasa. Penggunaan kata “malakin” menggeser makna pemungutan pajak dari aktivitas negara yang sah menjadi tindakan pemaksaan yang merugikan masyarakat. Melalui pilihan diksi tersebut, penguasa direpresentasikan sebagai pihak yang memanfaatkan kewenangan untuk menuntut hak dari rakyat, tetapi tidak menjalankan kewajiban untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, teks membangun representasi bahwa kekuasaan telah digunakan secara tidak proporsional dan cenderung merugikan masyarakat.

Takarir pada data C.5 merepresentasikan pejabat atau kelompok elite sebagai pihak yang merasa memiliki hak istimewa lebih besar dibanding masyarakat biasa. Representasi tersebut dibangun melalui frasa “Negara ini bukan punya keluarga kalian saja” yang menegaskan bahwa ruang publik merupakan milik seluruh warga negara, bukan milik kelompok tertentu. Selain itu, penegasan bahwa lokasi tersebut merupakan “tikungan tajam”, “tanjakan berbahaya”, dan “jalan milik publik” membangun citra adanya tindakan yang mengabaikan

keselamatan serta hak pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, teks merepresentasikan penyalahgunaan posisi sosial atau kekuasaan yang membuat sebagian pihak bertindak seolah berada di atas aturan yang berlaku bagi masyarakat umum.

Takrir pada data D.1 merepresentasikan kelompok elite politik dan kekuasaan sebagai pihak yang memiliki perilaku menyimpang serta merugikan masyarakat. Representasi tersebut dibangun melalui deretan judul film horor seperti “Siksa Kubur Koruptor”, “Mulut Belatung Politisi Penjilat”, dan Perut Buncit Berisi Ular Para Pejabat”. Penggunaan unsur horor membangun citra negatif terhadap kelompok yang dikritik dan menempatkan mereka sebagai sumber ketakutan, kerusakan, atau persoalan sosial. Dengan demikian, teks merepresentasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan moral yang dilakukan oleh berbagai aktor yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan politik.

4. Representasi Kritik Terhadap Korupsi dan Pemborosan Anggaran Negara

Data A.2

“Motor listrik ini gagah sekali, Kawan. Harganya saja wow banget, 57 juta per unitnya. Ngeri deh, hanya utk motor, habis duit segini. Speks super, seolah dapur2 itu lokasinya di pos gunung Rinjani semua. 57 juta! Beli! Indonesia tuh benar2 kaya ternyata. Tahniah rakyat Indonesia, Presiden telah bertitah, laksanakan MBG dan KMP! Maka mau ratusan triliun dihabiskan tanpa mikir, laksanakan!”
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 7 April 2026)

Data B.3

“Dan sorry, tidak pakai duit negara. Pakai duit saya, duit penerbit, dari keuntungan jual buku2 sy.
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 5 Juni 2024)

Data B.5

“MISKIN tapi banyak gaya=INDONESIA”
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 27 Maret 2026)

Data B.9

“Karena, eh kalian ini tidak salah alamat? Tere Liye itu kan tidak pegang duit negara triliunan rupiah.”
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 21 April 2026)

Data D.3

“Negara kaya itu cirinya: kabinetnya super gemuk, bagi2 jabatan seenaknya, triliunan duit habis hanya utk fasilitas pejabat2nya saja. Yg saat mau rapat saja, itu rapat atau atau apa sih? Sesak pesertanya. Itu benar2 bangsa yang besaaaaar. Besar halunya.” (Sumber: Instagram @tereliyewriter, 28 Januari 2026)

Data D.4

“Mubazir itu temennya setan, fix ini anak2 yg nggak ngabisin makanan MBG temennya setan semua. Pejabat? Mbuh siapa temannya.”
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 12 Februari 2026)

Data E.1

“Ditambah lagi, aduh, Pak Indo ini hobi makan2, 25T sebulan.”
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 26 April 2026)

Takrir pada data A.2 merepresentasikan pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan anggaran negara dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan efektivitas dan kebutuhan yang lebih mendesak. Representasi tersebut dibangun melalui penekanan berulang terhadap nominal biaya, seperti “57 juta per unit” dan “ratusan triliun”. Selain itu, kalimat “Indonesia tuh benar2 kaya ternyata” menghadirkan gambaran bahwa pemerintah bertindak seolah-olah memiliki sumber daya yang tidak terbatas sehingga dapat mengeluarkan anggaran dalam jumlah besar. Dengan demikian, teks merepresentasikan adanya pemborosan anggaran negara yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Takrir pada data B.3 merepresentasikan kontras antara penggunaan dana pribadi dan penggunaan uang negara. Representasi tersebut dibangun melalui pengulangan frasa “tidak pakai duit negara” dan “pakai duit saya, duit penerbit”. Pengulangan tersebut memberikan penekanan bahwa aktivitas yang dilakukan penulis tidak membebani anggaran publik. Secara tidak langsung, teks membangun citra negatif terhadap pihak-pihak yang memiliki akses terhadap uang negara tetapi dinilai belum mampu memberikan manfaat yang nyata bagi

masyarakat. Dengan demikian, wacana ini merepresentasikan kritik terhadap pengelolaan anggaran negara yang dianggap tidak efektif serta menyiratkan persoalan korupsi atau pemborosan dalam penggunaan dana publik.

Takrir pada B.5 merepresentasikan kontradiksi antara kondisi ekonomi masyarakat dan pola pengeluaran negara. Representasi tersebut dibangun melalui pertentangan antara kata “miskin” dan frasa “banyak gaya”. Kata “miskin” menggambarkan keterbatasan ekonomi, sedangkan “banyak gaya” menunjukkan perilaku yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi yang dimiliki. Penggabungan kedua unsur tersebut membentuk citra Indonesia sebagai negara yang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi, tetapi tetap mengalokasikan anggaran besar untuk fasilitas dan kepentingan pejabat. Dengan demikian, teks merepresentasikan kritik terhadap penggunaan anggaran negara yang dianggap tidak proporsional dan tidak sejalan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Takrir pada data B.9 merepresentasikan adanya kesenjangan antara pihak yang menggunakan dana pribadi dan pihak yang memiliki akses terhadap anggaran negara dalam jumlah besar. Representasi tersebut dibangun melalui pertentangan antara posisi penulis yang memperoleh dana dari hasil penjualan buku dengan pihak yang “pegang duit negara triliunan rupiah”. Melalui konstruksi tersebut, teks mengarahkan kritik kepada elite yang memiliki kendali atas sumber daya negara. Dengan demikian, teks merepresentasikan pengelolaan anggaran negara sebagai sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki kekuasaan dan sumber daya publik dalam jumlah besar.

Takrir pada data D.3 merepresentasikan pemerintahan sebagai institusi yang menghabiskan sumber daya negara secara berlebihan untuk kepentingan

elite birokrasi. Representasi tersebut dibangun melalui frasa “kabinetnya super gemuk” dan “triliunan duit habis hanya utk fasilitas pejabat2nya saja” yang menggambarkan struktur pemerintahan yang besar sekaligus boros. Selain itu, kalimat “itu rapat atau apa sih? Sesak pesertanya” memperkuat citra bahwa jumlah pejabat yang terlibat dianggap tidak proporsional. Dengan demikian, teks merepresentasikan adanya penggunaan anggaran negara yang lebih banyak diarahkan untuk kepentingan pejabat dibandingkan kebutuhan masyarakat luas.

Takarir pada data D.4 merepresentasikan adanya pemborosan dalam pengelolaan program publik yang dibiayai negara. Representasi tersebut dibangun melalui perbandingan antara makanan yang tidak dihabiskan oleh anak-anak dengan penggunaan anggaran besar dalam program MBG. Kalimat “Mubazir itu temennya setan” menjadi titik awal kritik terhadap tindakan membuang sesuatu yang masih bernilai. Namun, fokus kritik diperluas melalui frasa “Pejabat? Mbuh siapa temannya” yang mengisyaratkan bahwa pemborosan yang lebih besar justru berada pada tingkat pengambil kebijakan. Dengan demikian, teks merepresentasikan pejabat sebagai pihak yang dikaitkan dengan penggunaan anggaran yang tidak efisien dan berpotensi menimbulkan pemborosan sumber daya negara.

Takarir pada data E.1 merepresentasikan negara sebagai pihak yang mengeluarkan anggaran dalam jumlah sangat besar untuk suatu program publik. Representasi tersebut dibangun melalui personifikasi “Pak Indo” yang digunakan sebagai simbol Indonesia. Frasa “hobi makan-makan” menyederhanakan program bernilai puluhan triliun rupiah menjadi aktivitas sehari-hari yang terkesan biasa. Penyederhanaan tersebut justru memperkuat kritik terhadap besarnya pengeluaran

negara. Dengan demikian, teks merepresentasikan adanya pemborosan atau penggunaan anggaran yang dianggap berlebihan dibandingkan kebutuhan yang lebih mendesak.

5. Representasi Kritik Terhadap Nepotisme dan Hak Istimewa Politik

Data B.4

“Giliran bpjs, iuran ini itu, potongan ini itu, **pajak, elu paksa semua harus bayar. Giliran berkuasa, cuma keluarga, teman2 elu doang yg boleh.** Pakyu!”
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 21 Agustus 2024)

Data B.11

“Daaan, itu ponakan Prabowo, pernah lihat data2 nggak sih? Atau karena dia masuk BI lewat jalur ponakan, bukan PCPM, jadi begitulah deh.”
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 29 April 2026)

Data D.2

“**Jika kalian berminat, silahkan kirimkan email ke: ipkduakomatiga@gmail.com.** NB: Kami benar-benar minta maaf jika syarat iklan ini sangat berat. **Jika kalian mau yang mudah, silahkan melamar jadi cawapres, atau anggota DPR/DPRD, atau jadi gubernur, bupati, walikota. Tolong memantaskan diri. Jika speks kalian rendah, gunakan jalur ordal atau keluarga saja.**”
(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 20 April 2024)

Takarir pada data B.4 merepresentasikan adanya ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Representasi tersebut dibangun melalui pertentangan antara frasa “semua harus bayar” dan “cuma keluarga, teman2 elu doang yg boleh”. Pada bagian pertama, masyarakat direpresentasikan sebagai pihak yang wajib memenuhi berbagai kewajiban kepada negara. Sebaliknya, pada bagian kedua, akses terhadap kekuasaan direpresentasikan hanya terbuka bagi kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa. Melalui konstruksi tersebut, teks membangun citra bahwa kekuasaan dijalankan secara khusus dan lebih menguntungkan keluarga maupun lingkaran pertemanan tertentu daripada masyarakat secara umum. Dengan demikian, wacana ini merepresentasikan kritik terhadap praktik nepotisme dan hak istimewa politik.

Takarir pada data B.11 merepresentasikan adanya ketimpangan akses

terhadap jabatan atau posisi strategis. Representasi tersebut dibangun melalui pertentangan antara frasa “jalur ponakan” dan “bukan PCPM”. PCPM merupakan jalur rekrutmen resmi yang identik dengan seleksi berdasarkan kompetensi dan kualifikasi. Sebaliknya, frasa “jalur ponakan” merepresentasikan akses yang diperoleh melalui hubungan keluarga. Melalui konstruksi tersebut, teks membangun citra bahwa hubungan kekerabatan lebih menentukan peluang memperoleh posisi tertentu, dibandingkan kemampuan profesional. Dengan demikian, wacana ini merepresentasikan kritik terhadap praktik nepotisme dan hak istimewa politik dalam pengisian jabatan publik.

Takrir pada data D.2 merepresentasikan dunia politik sebagai ruang yang tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip kepemimpinan yang didasarkan pada kemampuan. Representasi tersebut dibangun melalui pertentangan antara syarat kerja yang digambarkan sangat berat dengan jabatan politik yang justru digambarkan sebagai sesuatu yang mudah diperoleh. Frasa “jalur ordal atau keluarga” menjadi penanda utama yang merepresentasikan adanya akses istimewa yang dimiliki oleh kelompok tertentu karena hubungan personal atau kekerabatan. Dengan demikian, teks membangun citra bahwa kesempatan memperoleh jabatan publik tidak selalu ditentukan oleh kompetensi, tetapi juga oleh kedekatan dengan jaringan kekuasaan.

6. Representasi Kritik Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat

Data B.1

“Lebih2 jika kamu orang Indonesia, belain Israel, kamu benar2 di luar nalar”

(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 1 Maret 2024)

Data B.6

“JANGAN pernah lagi pakai HP kalian buat foto/video. Karena itu jelas merugikan fotografer. Kan nggak asik loh, kalian koar-koar benci AI, menghakimi orang lain saat pakai AI (marah2 ke Tere Liye, dll), eeh, kalian ternyata pakai AI juga. Kalian telah merugikan fotografer di muka bumi. Nyadar tidak?”

(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 5 April 2026)

Data B.13

“Nah, jika kalian tidak terima fakta ini., yuk mari, tunjukkan Food Estate di Indonesia yg sukses panen terus menerus sampai hari ini?

Pintarlah dikit. Mosok sampai hari ini masiiih saja mudah dikadalin politisi.”

(Sumber: Instagram @tereliyewriter, 3 Mei 2026)

Takrir pada data B.1 merepresentasikan adanya pertentangan nilai dalam masyarakat terkait isu kemanusiaan dan konflik internasional. Representasi tersebut dibangun melalui penyebutan identitas “orang Indonesia” yang kemudian dipertentangkan dengan tindakan “belain Israel”. Melalui konstruksi tersebut, penulis membangun citra bahwa dukungan terhadap Israel merupakan sikap yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan maupun solidaritas yang diyakini sebagian masyarakat Indonesia. Selain itu, frasa “di luar nalar” merepresentasikan kelompok yang mendukung Israel sebagai pihak yang memiliki cara berpikir yang tidak dapat diterima secara logis. Dengan demikian, teks ini merepresentasikan kritik terhadap sikap sosial sebagian masyarakat yang dianggap tidak empati terhadap penderitaan korban konflik.

Takrir pada data B.6 merepresentasikan sebagian masyarakat sebagai kelompok yang tidak konsisten dalam memandang penggunaan teknologi AI. Representasi tersebut dibangun melalui pertentangan antara tindakan “koar-koar benci AI” dan kenyataan bahwa mereka “ternyata pakai AI juga”. Kontras tersebut menampilkan citra masyarakat yang cenderung menghakimi penggunaan AI oleh orang lain, tetapi tidak menyadari bahwa mereka sendiri memanfaatkan teknologi yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan pertanyaan “Nyadar tidak?” memperkuat posisi penulis sebagai pihak yang mempertanyakan kesadaran dan konsistensi sikap kelompok yang dikritik. Dengan demikian, teks ini merepresentasikan kritik terhadap perilaku sosial yang dianggap tidak konsisten

dalam menyikapi perkembangan teknologi.

Takrir pada data B.13 merepresentasikan sebagian masyarakat sebagai kelompok yang kurang kritis dalam menilai informasi dan kebijakan politik. Representasi tersebut dibangun melalui pertanyaan mengenai keberhasilan program Food Estate yang diikuti dengan ungkapan “Pintarlah dikit” dan “mudah dikadalin politisi”. Pilihan diksi tersebut membentuk citra masyarakat sebagai pihak yang masih mudah menerima klaim politik, tanpa melakukan evaluasi berdasarkan fakta yang tersedia. Dengan demikian, teks merepresentasikan kritik terhadap rendahnya sikap kritis masyarakat dalam menyikapi kebijakan dan janji-janji politik.

Berdasarkan hasil analisis dimensi teks terhadap data A.1–E.2, ditemukan bahwa wacana sindiran dalam unggahan Instagram @tereliyewriter merepresentasikan berbagai kritik sosial dan politik yang dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori utama, yaitu representasi kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap kompetensi pejabat, kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan, kritik terhadap korupsi dan pemborosan anggaran negara, kritik terhadap nepotisme dan hak istimewa politik, serta kritik terhadap kondisi sosial masyarakat. Dari keseluruhan data, representasi yang paling dominan muncul pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, kompetensi pejabat, dan pemborosan anggaran negara. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa penulis memosisikan pemerintah dan para pemegang kekuasaan sebagai objek utama kritik dalam wacana yang dibangun.

Representasi tersebut dibentuk melalui berbagai pilihan bahasa yang menampilkan objek tertentu secara negatif, seperti pemerintah yang dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pejabat yang dipandang kurang kompeten, praktik kekuasaan yang dinilai tidak adil, hingga penggunaan anggaran negara yang

dianggap berlebihan. Selain itu, sebagian data juga merepresentasikan masyarakat sebagai kelompok yang kurang kritis terhadap informasi dan kebijakan politik. Dengan demikian, teks tidak hanya mengkritik penguasa, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih reflektif dalam menyikapi realitas sosial dan politik.

Temuan penelitian ini, sejalan dengan penelitian oleh Zainuddin, I., Darwis, M., & Iswary E. (2021) yang juga mengungkap representasi untuk melihat cara objek ditampilkan dalam teks. Ada tiga cara yang bisa dilakukan, yang pertama adalah representasi dalam anak kalimat. Ketika ingin menampilkan objek dalam teks, pengguna bahasa akan berhadapan pada tingkat kosakata objek dituliskan dengan dimasukkan dalam satu set kategori dan pada tingkat tatabahasa. Kedua, representasi dalam kombinasi anak kalimat. Apabila satu kalimat digabung dengan kalimat yang lain, akan melahirkan makna tertentu. Ketiga, representasi dalam rangkaian antarkalimat. Cara ketiga ini dapat dilihat pada perangkaian dua kalimat atau lebih. Dengan demikian, representasi dalam wacana tidak hanya muncul dari satu kata atau kalimat, melainkan dibangun melalui hubungan antarkata, antarkalimat, dan keseluruhan konteks teks yang membentuk makna tertentu mengenai realitas sosial dan politik yang dikritik oleh penulis.

B. Praktik Diskursif

Berdasarkan takarir yang dianalisis, praktik diskursif pada akun Instagram @tereliyewriter menunjukkan bahwa media sosial digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kritik sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan fenomena sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Dalam praktik produksinya, takarir tersebut ditulis langsung dengan gaya bahasa yang khas, yaitu menggunakan bahasa informal, satire, ironi, sinisme, sarkasme, maupun inuendo agar pesan yang disampaikan terasa

lebih dekat dengan pembaca media sosial. Penggunaan bahasa sehari-hari seperti “bangsat” pada data C.4, “tolol” pada data C.1, “halu” pada data B.14, “pintarlah dikit” pada data B.2, dan berbagai bentuk sindiran lainnya serta penggunaan singkatan teks atau bahasa gaul pada kata takarir seperti pada “sdh” pada data A.1, “benar2” pada data B.1, “sorry” pada data B.3, “zonk” pada data C.2, “dgn” pada data D.1, “makan2” pada data E.1 membuat takarir lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum serta mampu menarik perhatian khalayak di media sosial.

Selain itu, penulis juga memanfaatkan isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan publik, seperti program MBG pada data D.4, Food Estate pada data B.13, perjalanan dinas luar negeri pada data A. 3 dan E.2, nepotisme pada data B.11, hingga kebijakan ekonomi pemerintah pada data B.4. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses produksi teks tidak terlepas dari kondisi sosial dan politik yang sedang berkembang. Takarir-takarir tersebut dibentuk dengan cara menggabungkan opini pribadi, kritik sosial, dan penggunaan majas sindiran sehingga menghasilkan wacana yang provokatif, emosional, dan mudah memancing respons pembaca.

Dalam proses penyebarannya, Instagram menjadi media yang efektif untuk menyebarkan wacana kritik tersebut kepada masyarakat luas. Sebagai media sosial yang memiliki fitur komentar, like, repost, dan share, Instagram memungkinkan takarir tersebut dengan cepat tersebar dan didiskusikan oleh pengguna lain. Banyaknya pengikut akun @tereliyewriter juga membuat pesan yang disampaikan memiliki jangkauan yang luas dan mampu membentuk opini publik terhadap isu tertentu.

Sementara itu, dari sisi konsumsi teks, takarir yang diunggah oleh @tereliyewriter cenderung memperoleh respons positif dari para pengikutnya. Berdasarkan pengamatan terhadap kolom komentar, sebagian besar netizen

menunjukkan dukungan terhadap kritik yang disampaikan karena dianggap mewakili keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan persoalan sosial yang sedang berkembang. Dukungan tersebut tampak melalui komentar-komentar yang menyetujui pendapat penulis, memberikan apresiasi, serta menambahkan pandangan yang sejalan dengan isi takarir. Hal ini menunjukkan bahwa takarir Instagram @tereliyewriter tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi di media sosial, tetapi juga menjadi ruang diskusi publik mengenai berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, beberapa unggahan yang menggunakan bahasa sindiran dengan tingkat kekasaran lebih tinggi atau mengandung majas sarkasme diketahui sudah tidak tersedia pada akun tersebut karena telah dihapus oleh pemilik akun. Dengan demikian, konsumsi teks pada akun @tereliyewriter memperlihatkan adanya penerimaan yang cukup kuat dari khalayak terhadap wacana kritik yang dibangun melalui penggunaan bahasa sindiran.

Pada analisis aspek diskursif dilakukan pemrosesan wacana yang merangkum aspek produksi, penyebaran, dan penggunaan sebuah teks (Mardiana, 2020). Dalam penelitian ini, proses produksi teks terlihat dari cara akun Instagram @tereliyewriter menyusun takarir dengan memanfaatkan berbagai bentuk bahasa sindiran untuk mengkritik fenomena sosial dan kebijakan pemerintah. Aspek penyebaran teks tampak melalui penggunaan Instagram sebagai media yang memungkinkan takarir tersebut menjangkau khalayak secara luas dan cepat. Sementara itu, aspek penggunaan atau konsumsi teks terlihat dari respons para pengikut yang memberikan dukungan serta tanggapan terhadap kritik yang disampaikan. Dengan demikian, praktik diskursif dalam takarir Instagram @tereliyewriter memperlihatkan bagaimana media sosial digunakan sebagai alat untuk membangun, menyebarkan, dan mempertahankan

wacana kritik sosial melalui penggunaan bahasa sindiran yang mampu menarik perhatian publik serta memengaruhi cara masyarakat memandang suatu isu.

C. Praktik Sosiokultural

1. Situasional

Takarir yang diunggah oleh akun Instagram @tereliyewriter muncul di tengah berbagai polemik kebijakan pemerintah yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada data D.4, Food Estate pada data B.13, perjalanan dinas luar negeri pejabat negara pada data A.3 dan E.2, hingga isu kesejahteraan masyarakat dan penggunaan anggaran negara pada data B.3. Berbagai kebijakan tersebut memunculkan pro dan kontra di ruang publik karena sebagian masyarakat menilai kebijakan yang dibuat pemerintah belum sepenuhnya memberikan dampak yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Kondisi tersebut kemudian menjadi latar sosial yang memengaruhi munculnya berbagai bentuk kritik di media sosial, termasuk melalui takarir yang ditulis oleh Tere Liye.

Dalam situasi tersebut, penulis memanfaatkan Instagram sebagai media untuk menyampaikan pandangan dan keresahannya terhadap fenomena sosial maupun politik yang sedang terjadi. Takarir yang diunggah tidak hanya berfungsi sebagai opini pribadi, tetapi juga merepresentasikan kritik sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Penggunaan bahasa sindiran seperti ironi, sinisme, sarkasme, satire, dan inuendo menunjukkan adanya upaya penulis untuk menyampaikan kritik secara tidak langsung, tetapi tetap tajam dan mudah dipahami pembaca. Selain itu, penggunaan bahasa informal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh pengikut akun

tersebut.

Situasi sosial dan politik yang sedang berkembang juga memengaruhi bagaimana takarir-takarir tersebut dipahami oleh masyarakat. Isu mengenai pemborosan anggaran, nepotisme, ketimpangan sosial, dan kebijakan pemerintah menjadi topik yang sensitif serta banyak diperbincangkan di ruang publik digital. Oleh sebab itu, takarir yang mengandung sindiran terhadap pemerintah dan pejabat negara cenderung memperoleh perhatian besar dari masyarakat karena dianggap mewakili keresahan publik. Dengan demikian, praktik sosiokultural pada takarir Instagram @tereliyewriter menunjukkan bahwa bahasa sindiran yang digunakan tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat yang sedang berkembang pada saat teks tersebut diproduksi.

2. Institusional

Instagram sebagai media sosial memiliki peran penting dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik di masyarakat. Melalui fitur unggahan, komentar, dan berbagi ulang, sebuah informasi dapat tersebar dengan cepat kepada banyak pengguna dalam waktu singkat. Kondisi ini menjadikan Instagram tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk menyampaikan pendapat, kritik sosial, dan respons terhadap berbagai isu yang sedang berkembang di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, akun Instagram @tereliyewriter memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, fenomena sosial, serta berbagai persoalan yang dianggap merugikan masyarakat.

Sebagai seorang penulis terkenal dengan jumlah pengikut yang besar, Tere Liye memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam membangun perhatian publik

terhadap isu tertentu. Takarir yang diunggahnya cenderung mudah mendapatkan respons dari masyarakat karena figur Tere Liye telah dikenal luas sebagai penulis yang aktif menyampaikan pandangan sosial dan politik melalui media sosial. Hal tersebut menyebabkan setiap unggahan yang dibuat tidak hanya dibaca sebagai opini pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi cara pandang pengikutnya terhadap suatu kebijakan atau peristiwa sosial tertentu.

Selain itu, penggunaan bahasa sindiran, ironi, sinisme, sarkasme, satire, dan inuendo dalam takarir tersebut membuat kritik yang disampaikan terasa lebih menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Gaya bahasa yang komunikatif dan dekat dengan bahasa sehari-hari masyarakat juga menjadikan pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Dengan demikian takarir pada akun Instagram @tereliyewriter tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ekspresi pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari praktik sosial yang mampu membangun, memengaruhi, bahkan memperkuat opini publik terhadap isu sosial dan politik yang sedang berkembang di masyarakat.

3. Sosial

Takarir yang diunggah pada akun Instagram @tereliyewriter merepresentasikan kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap berbagai persoalan sosial dan politik di Indonesia. Kritik tersebut terlihat melalui pembahasan mengenai kekuasaan pada data A.4, nepotisme pada data B.11, pemborosan anggaran negara pada data A.2, bahkan ketimpangan sosial yang ada pada data B.4. Berbagai isu tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, dan penggunaan anggaran negara. Oleh

sebab itu, takarir yang mengandung bahasa sindiran menjadi salah satu bentuk penyampaian keresahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Selain itu, wacana yang dibangun dalam takarir tersebut menunjukkan adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah dan elite politik. Hal ini tampak dari berbagai sindiran yang diarahkan kepada pejabat negara, kebijakan pemerintah, serta praktik kekuasaan yang dianggap lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat luas. Penggunaan bahasa sindiran seperti ironi, sinisme, sarkasme, satire, dan inuendo memperlihatkan bahwa kritik tidak hanya disampaikan secara langsung saja, melainkan melalui ungkapan-ungkapan yang menyiratkan kekecewaan, ejekan, maupun penolakan terhadap kondisi sosial yang sedang terjadi.

Di sisi lain, takarir tersebut juga menggambarkan adanya pandangan masyarakat bahwa praktik nepotisme dan pembagian kekuasaan masih menjadi persoalan dalam pemerintahan, hal ini ada pada data B.11. Kritik terhadap pemborosan anggaran dan berbagai proyek pemerintah menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan dana negara yang dianggap kurang efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, hal ini juga terdapat pada data D.4. Dengan demikian, takarir pada akun Instagram @tereliyewriter tidak hanya menjadi media ekspresi pribadi penulis, tetapi juga merepresentasikan suara sebagian masyarakat yang merasa kecewa, kritis, dan kurang percaya terhadap kebijakan pemerintah maupun elite politik di Indonesia.

Dari analisis tersebut, dapat diketahui bahwa wacana yang dibangun dalam takarir Instagram @tereliyewriter tidak terlepas dari praktik sosial dan budaya yang melatarbelakanginya. Hal ini sejalan dengan Fitriyani (2025) yang menyatakan

bahwa praktik sosial dan budaya mencakup aspek situasional, institusional, dan sosial yang memengaruhi media serta wacana yang dihasilkan. Pada aspek situasional, takarir tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai isu dan kebijakan pemerintah yang sedang menjadi perhatian publik. Pada aspek institusional, Instagram berperan sebagai media yang memungkinkan penyebaran kritik sosial kepada khalayak secara luas. Sementara itu, pada aspek sosial, penggunaan bahasa sindiran dalam takarir merefleksikan kondisi masyarakat yang kritis terhadap persoalan politik, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, wacana kritik yang terdapat dalam takarir Instagram @tereliyewriter merupakan hasil interaksi antara teks, media, dan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.